

EVALUASI TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN SANGKRAH BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 2 TAHUN 2016

Farrah Lintang Cahyawati¹⁾, Irfiarrobi' Wildhanio Arrafi¹⁾ & Nadya Shabrina¹⁾

¹⁾ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

*Email korespondensi : farrahlintang@student.uns.ac.id irfiarrobi@student.uns.ac.id,
nadyashabrina@student.uns.ac.id*

ABSTRAK

Evaluasi tingkat kekumuhan di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dilakukan berdasarkan kriteria Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2016. Peraturan tersebut mencakup tujuh indikator utama, seperti kondisi bangunan, infrastruktur, dan utilitas, untuk menilai kawasan permukiman kumuh. Metode skoring digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kekumuhan menjadi kategori bukan kumuh, kumuh ringan, sedang, dan berat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kelurahan Sangkrah termasuk dalam kategori kumuh sedang, dengan tantangan utama terkait pengelolaan sampah, sistem drainase, dan kondisi perumahan. Perlunya intervensi terarah ditekankan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kawasan kumuh di Surakarta. Rekomendasi meliputi peningkatan sistem pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur drainase, serta penyediaan solusi perumahan yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Kata kunci : evaluasi, kelurahan sangkrah, regulasi, tingkat kekumuhan

ABSTRACT

The evaluation of the level of slums in Sangkrah Urban Village, Pasar Kliwon Sub-district, Surakarta City, was conducted based on the criteria of the Minister of Public Works and Housing Regulation No. 2 Year 2016. The regulation includes seven main indicators, such as building conditions, infrastructure, and utilities, to assess slum areas. The scoring method was used to classify the level of slums into the categories of not slum, light slum, medium slum, and heavy slum. The results of the analysis show that Kelurahan Sangkrah falls into the moderate slum category, with major challenges related to waste management, drainage systems, and housing conditions. The need for targeted interventions is emphasized to improve quality of life and reduce slums in Surakarta. Recommendations include enhancing waste disposal systems, upgrading drainage infrastructure, and providing better housing solutions to address the community's pressing needs.

Keywords : evaluate, level of slum, regulation, sangkrah village

1. PENDAHULUAN

Informalitas atau informalitas perkotaan menurut Paul Jones (2018), memiliki prinsip utama yang merupakan suatu ketidakteraturan dan pelanggaran hukum serta tidak adanya ketertiban fisik dan sosial di luar batas sistem yang direncanakan. Hal ini merujuk pada suatu fenomena ruang perkotaan dengan munculnya kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan dan tidak

memiliki suatu perlindungan legalitas. Dalam konteks permukiman, permukiman informal menurut Dina Mamdouh Nassar (2017), permukiman informal mengacu pada berbagai macam tempat tinggal yang terdiri dari komunitas-komunitas yang bertempat tinggal di tempat penampungan yang dibangun sendiri yang dianggap informal berdasarkan status hukum, kondisi fisik, atau keduanya. Hampir semua kota di negara berkembang menunjukkan adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaannya. Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari kota-kota besar dan permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di lainnya, serta kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dan pertambahan jumlah perumahan yang disediakan di kota tidak seimbang, sehingga menjadi menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh (Widyastuty & Jihan, 2017). Penyebab terjadinya permukiman kumuh umumnya terjadi di kawasan perkotaan, dikarenakan tingginya angka urbanisasi yang menyebabkan kebutuhan akan perumahan yang meningkat. Namun, dengan kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah menimbulkan akan pertumbuhan permukiman informal yang organik. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang tidak luput akan permasalahan atau isu permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 653/96 tahun 2024 tentang Lokasi perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta, luasan kumuh di Kota Surakarta sebesar 63,27 hektare. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai wujud pengurangan akan luasan kawasan kumuh di Kota Surakarta. Salah satu fokus akan keputusan untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Surakarta berada pada Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon. Didukung dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 653/141 Tahun 2024 tentang Penerima Hunian Tetap Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Segmen Losari Demangan Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 2024 yang menjadi aksi nyata Kota Surakarta akan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sangkrah.

2. STUDI LITERATUR

2.1 Permukiman

Menurut Doxiadis (1977), permukiman memiliki lima unsur utama meliputi, alam (*nature*), manusia (*antropos*), masyarakat (*society*), ruang kehidupan (*shell*), dan jaringan (*network*). Pengadaan permukiman memiliki tujuan untuk mewujudkan wilayah dengan hunian dan tempat tinggal yang menunjang kehidupan dan penghidupan secara terencana. Kawasan permukiman memiliki fungsi yang lebih luas dari perumahan, yang mana perumahan yaitu tempat tinggal dan tempat untuk mendapatkan nafkah oleh penghuninya (Sadana, 2014). Menurut Sonda (2017) dalam Alhabisy dkk (2019), permukiman pada dasarnya merupakan bagian dari suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat untuk penduduk/pemukim tinggal dan melakukan berbagai aktivitas/kegiatan, dalam bentuk kegiatan ekonomi (usaha, pekerjaan, dll), kegiatan sosial dan budaya (sebagai masyarakat), dan memenuhi memenuhi kebutuhan kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan penduduk itu sendiri.

2.2 Penggunaan Formula Matematik

Menurut World Bank (1999) dalam Musthofa (2011) permukiman kumuh adalah bagian terabaikan dari lingkungan perkotaan yang mana, kehidupan dari masyarakat tersebut memprihatinkan, hal ini dilihat dari kepadatan penduduk dan hunian yang tidak layak, serta prasarana sarana utilitas yang ada tidak memenuhi standar dan tidak tercukupinya fasilitas umum dan sosial. Krisdayanti dkk (2019) menjelaskan apabila faktor dari karakteristik permukiman kumuh dapat berbeda dan disesuaikan kembali dengan tipologi kawasan itu sendiri, meliputi kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai, di sepanjang rel kereta api, dan permukiman padat perkotaan. Menurut Rindjono (2013) dalam Pabuang dkk (2022), faktor-faktor yang

menimbulkan permukiman kumuh di perkotaan yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor lahan perkotaan dan faktor tata ruang.

2.3 Kriteria Permukiman Kumuh

Kriteria permukiman kumuh merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kondisi kekumuhan di permukiman kumuh. Kriteria yang digunakan dalam penanganan rumah kumuh berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria permukiman kumuh

| Kriteria | Indikator |
|------------------------|---|
| Bangunan gedung | <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakaturan bangunan • Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang • Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat |
| Jalan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman • Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk • Ketidaktersediaan akses aman air minum • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku |
| Penyediaan air minum | <ul style="list-style-type: none"> • Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan • Ketidaktersediaan drainase • Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan • Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya • Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk |
| Drainase lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku • Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis |
| Pengelolaan air limbah | <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis • Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis • Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase |
| Pengelolaan sampah | <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran |
| Proteksi kebakaran | |

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016

Masalah yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup masyarakat perkotaan mencakup berbagai aspek. Dari sisi fisik, terdapat persoalan kualitas udara, air, dan tanah. Lingkungan perumahan juga menghadapi tantangan seperti kawasan kumuh, kepadatan tinggi, lokasi yang kurang layak, serta mutu dan keselamatan bangunan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan layanan kota sering kali terbatas. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi turut mempengaruhi kualitas hidup, misalnya kesenjangan dan ketidakmerataan kondisi antar golongan atau antar warga, serta minimnya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kohesi sosial dan kesetaraan menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Ahaliki, 2020).

3. METODOLOGI

3.1 Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode scoring atau pembobotan dalam menentukan tingkat kekumuhan. Pemilihan metode tersebut dilakukan karena mempertimbangkan berbagai aspek. Setiap kriteria pada aspek memiliki bobot pengaruh yang berbeda sehingga dapat dengan mudah menentukan prioritas dalam pengembangan. Adapun variabel, indikator dan parameter berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terdiri dari:

1. Bangunan gedung
2. Jalan lingkungan
3. Penyediaan air minum
4. Drainase lingkungan
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan sampah
7. Proteksi kebakaran

Dari sub kriteria setiap indikator pada tabel 1, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut

1. Pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian:
 - a. Kualitas Baik (0%-25%) : Skor 0
 - b. Kualitas Cukup Baik (26%-50%) : Skor 1
 - c. Kualitas Buruk (51% - 75%) : Skor 3
 - d. Kualitas Sangat Buruk (76% -100%): Skor 5
2. Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan rumus sebagai berikut:

$$Si = \frac{\Sigma Bi}{\Sigma P} \quad (1)$$

Keterangan:

Si = Total skor pada tiap indikator

ΣBi = Skor sub kriteria

ΣP = Jumlah Sub Kriteria

3. Klasifikasi tingkat kekumuhan

Berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas, yakni:

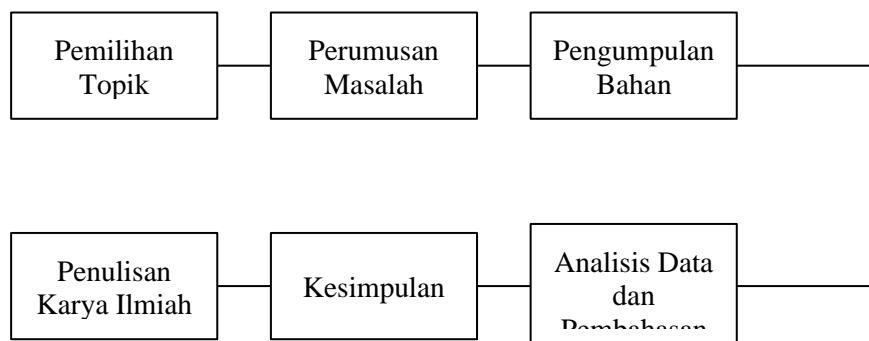
- a. Bukan Kawasan Kumuh : 0-8,75
- b. Kawasan Kumuh Ringan : 8,76 - 17,50
- c. Kawasan Kumuh Sedang : 17,51 - 26,25
- d. Kawasan Kumuh Berat : >26,26

3.2 Metode Pengumpulan

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan observasi dan data sekunder. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2018:145). Observasi dilakukan pada beberapa aspek Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung untuk dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media perantara. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan (Sugiyono, 2019). Data sekunder dalam penelitian didapatkan melalui studi literatur pada beberapa referensi jurnal dan artikel di internet yang berhubungan dengan permukiman kumuh. Hasil dari pengumpulan data ini dianalisis dan dijadikan sebagai referensi dalam menyusun tugas.

3.3 Tahapan Penelitian

Pada sebuah penelitian, ada beberapa tahapan-tahapan yang sistematik agar hasil dari penelitian dapat tercapai dengan baik. Adapun tahapan-tahapan secara ringkas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Tahapan penelitian

Tahap 1: Persiapan dalam penelitian

Tahap persiapan penelitian terkait permukiman kumuh dilaksanakan beberapa tahap. Adapun langkah yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Mengidentifikasi latar belakang penelitian
2. Latar belakang penelitian dikarenakan adanya isu permukiman kumuh di Surakarta tepatnya pada Kelurahan Sangkrah sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam menangani hal tersebut.
3. Membuat rumusan masalah dan tujuan
4. Rumusan masalah dan tujuan diperoleh berdasarkan latar belakang penelitian. Rumusan masalah dibuat menurut identifikasi masalah lalu dicetuskan tujuan dibuatnya penelitian.
5. Pencarian Tinjauan Teori dari berbagai sumber
6. Tinjauan teori untuk memberikan penjelasan dan dasar teori terkait hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran secara luas penelitian berupa, permukiman dan kriteria permukiman kumuh
7. Mengidentifikasi kriteria dan indikator penilaian
8. Kriteria dan indikator penilaian dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sehingga dapat dinilai dan diklasifikasikan dengan benar.

Tahap 2: Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah merumuskan garis besar penelitian. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pencarian data dan validitas data yang kemudian dilakukan analisis. Pengolahan data tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kekumuhan berdasarkan poin-poin penilaian yang sudah disusun. Analisis tingkat kekumuhan dengan beberapa indikator tersebut diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil

Tahap 3: Penulisan Karya Ilmiah

Tahapan ini dilaksanakan setelah bahan referensi cukup dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penulisan ini memiliki petunjuk teknis dengan tetap memperhatikan tujuan penulisan. Penulisan awal biasanya dalam bentuk draft berupa tulisan-tulisan kasar hasil dari kerangka penulisan dan perlu mengembangkan ide-ide yang bersifat tentatif. Dalam prosesnya, tentu akan banyak kendala dan kesalahan sehingga diperlukan revisi untuk mengevaluasi kembali. Perbaikan berupa ide dalam sebuah karangan serta berfokus pada penataan isi hingga sesuai dengan

kebutuhan. Yang dilakukan selanjutnya adalah penyuntingan mencakup perbaikan karangan berupa huruf kapital, struktur kalimat, istilah, format ejaan, tanda baca serta kosakata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kasus Terkait Fisik dan Spasial

Kelurahan Sangkrah merupakan salah kelurahan yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kawasan permukiman yang berada di Kelurahan Sangkrah menghadapi masalah serius terkait perumahan dan permukiman yang kumuh. Permukiman yang kumuh ini ditandai dengan kondisi fisik bangunan yang tidak terawat, dan kepadatan yang tinggi. Ditinjau dari infrastruktur yang ada, sarana dan prasarana dasar seperti air, bersih, sanitasi, dan drainase belum cukup untuk melayani penduduk dengan konsentrasi yang tinggi di Kelurahan Sangkrah.

Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan terbatasnya ruang terbuka hijau dan aksesibilitas jalan. Jalan lingkungan yang berada di kawasan ini sering kali tidak terawat dan juga sempit dikarenakan tidak tertatanya bangunan. Kondisi bangunan di kawasan ini sebagian besar adalah rumah tipe temporer dengan dinding berdempetan, mengakibatkan sirkulasi yang buruk. Menurut data yang dihimpun juga didapatkan bahwa Kelurahan Sangkrah memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 173 unit rumah.

Selain itu, ditinjau dari aspek prasarana seperti penyediaan air bersih dan sistem pembuangan limbah sangat kurang. Drainase yang tidak memadai menyebabkan genangan air saat hujan meningkatkan risiko kesehatan bagi penduduk.



Gambar 2 Peta Delineasi

4.2 Tingkat Kekumuhan

Tingkat kekumuhan dapat diukur dengan melihat indikator-indikator yang tertulis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Penilaian lokasi tersebut berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan. Adapun penilaian kawasan kumuh berdasarkan beberapa kriteria, sebagai berikut.

4.2.1 Bangunan Gedung

Kriteria pada bangunan gedung meliputi indikator berupa keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kelurahan Sangkrah terbagi menjadi 2 kawasan yaitu kawasan dekat dengan pemerintahan dan jalan utama dan kawasan dekat dengan tanggul dan Sungai Bengawan Solo. Terdapat perbedaan baik dari keteraturan bangunan dan kualitas bangunan. Luas Kelurahan Sangkrah adalah 44,2 Ha dengan dominasi lahan terbangun lebih dari 75%. Berdasarkan data BPS Kecamatan Pasar Kliwon 2020, Kelurahan Sangkrah memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Untuk keteraturan bangunan, Kelurahan Sangkrah tergolong teratur. Dilihat dari orientasi bangunan terhadap jalan yang ada dan kesamaan arah muka bangunan setiap rumahnya, Kelurahan Sangkrah memiliki bangunan-bangunan yang kurang teratur terlebih di sepanjang sungai dan rel kereta. Kualitas bangunan juga masih dinilai kurang karena terdapat bangunan semi-permanen di sepanjang Sungai Bengawan Solo.



Gambar 3 Bangunan Gedung

4.2.2 Jalan Lingkungan

Kriteria pada jalan lingkungan memiliki indikator yaitu jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Diketahui jika jalan lingkungan di Kelurahan Sangkrah didominasi oleh kondisi yang baik. Hal tersebut ditandai dengan jalan yang sudah diperkeras dengan aspal, cor, maupun paving dengan kualitas yang baik. Akan tetapi, dari kondisi yang ada, beberapa ruas jalan memiliki lebar jalan yang belum memenuhi standar teknis. Jalan lingkungan khususnya yang berada di pinggir tanggul Sungai Bengawan Solo yang ada kebanyakan masih sempit dan hanya bisa dilalui kendaraan bermotor saja.



Gambar 4 Jalan Lingkungan

4.2.3 Penyediaan Air Minum

Kriteria penyediaan air minum memiliki dua indikator untuk dapat menilai dan mengklasifikasikan kedalam permukiman kumuh. Adapun indikator tersebut adalah ketidaktersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. Ketersediaan air pada Kelurahan Sangkrah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi air bersih dan air minum pada Kelurahan Sangkrah yang tersedia sudah aman dan tidak berbau, tidak berwarna, serta tidak berasa.

4.2.4 Drainase Lingkungan

Kriteria drainase lingkungan memiliki berbagai indikator seperti Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada Kelurahan Sangkrah menghadapi tantangan terkait dengan sistem drainase dikarenakan kelurahan ini memiliki resiko banjir yang cukup tinggi. Drainase yang ada di Kelurahan Sangkrah belum merata dikarenakan terdapat beberapa RW yang belum terjangkau.



Gambar 5 Drainase

4.2.5 Pengelolaan Air Limbah

Kriteria Pengelolaan Air Limbah memiliki dua indikator yaitu, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Permukiman membutuhkan pembuangan air limbah yang baik sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat, namun pada Kelurahan Sangkrah terdapat sungai yang sudah tercemar limbah konveksi dari warga sekitarnya. Hal tersebut berpengaruh saat hujan deras tiba hingga meluap ke rumah warga di samping sungai.



Gambar 6 Pengelolaan Limbah

4.2.6 Pengelolaan Sampah

Kriteria pengelolaan sampah meliputi, prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. Pada Kelurahan Sangkrah pengelolaan sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis dimana pengelolaan sampah yang tidak pernah diambil petugas kebersihan ini, berdampak buruk pada kebiasaan masyarakat sehingga sampah langsung dilempar ke sungai. Pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga juga termasuk dalam salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan di Kelurahan Sangkrah, sebab sebagian warga masih membuang sampah rumah tangga ke sungai.



Gambar 7 Persampahan

4.2.7 Proteksi Kebakaran

Kriteria proteksi kebakaran memiliki 2 indikator, yaitu ketidaksediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Kondisi proteksi kebakaran di Kelurahan Sangkrah dapat dikatakan buruk. Hal tersebut dikarenakan belum siaganya ketersediaan sarana dan prasarana APAR di setiap titik kepadatan permukiman terlebih kondisi jalan yang relatif sempit tidak memungkinkan dilaluinya alat pemadam kebakaran.



Gambar 8 Peta Kriteria Kelurahan Sangkrah

Tabel 2 Perhitungan Kriteria Permukiman Kumuh

| No | Kriteria | Sub Kriteria | Skor | Total |
|---------------|------------------------|--|------|-------------|
| 1. | Bangunan Gedung | Ketidakaturan bangunan | 3 | |
| | | Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang | 3 | 3 |
| | | Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat | 3 | |
| 2. | Jalan Lingkungan | Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman | 3 | |
| | | Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk | 1 | 2 |
| 3. | Penyediaan Air Minum | Ketidaktersediaan akses aman air minum | 1 | |
| | | Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku | 1 | 1 |
| | | Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan | 3 | |
| 4. | Drainase Lingkungan | Ketidaktersediaan drainase | 1 | |
| | | Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan | 1 | 1,5 |
| | | Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya | 1 | |
| | | Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk | 1 | |
| 5. | Pengelolaan Air Limbah | Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku | 3 | |
| | | Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | 3 |
| | | Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis | 3 | |
| 6. | Pengelolaan Sampah | Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | 3,7 |
| | | Tidak terpeliarhanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase | 3 | |
| 7. | Proteksi Kebakaran | Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran | 5 | |
| | | Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran | 5 | 5 |
| Jumlah | | | | 19,2 |

Sumber: Analisis Kelompok

Berdasarkan hasil skoring, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta memperoleh total skor sebesar 19,2. Skor ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kategori kawasan kumuh sedang, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016. Kategori ini mencerminkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama terkait kualitas infrastruktur, fasilitas dasar, dan kondisi lingkungan permukiman. Faktor-faktor seperti akses jalan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta ketersediaan ruang terbuka mungkin masih memerlukan perbaikan agar memenuhi standar minimum kelayakan permukiman. Hal ini menandakan perlunya intervensi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut

5. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan dan didapatkan melalui kriteria yang yang berperdamaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 7 kriteria serta diperkuat dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 653/96 Tahun 2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa Kelurahan Sangkrah memiliki luas sebesar 6,16 Ha Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta terkategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh dengan klasifikasi sedang. Maka dari itu terdapat pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sangkrah, yaitu dengan pemenuhan pengelolaan persampahan dan drainase.

REFERENSI

- Alhabsyi, U., Warouw, F., & Sembel, A. (2019). Evaluasi Kekumuhan Pada Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tumiting Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 6(1), 90-100.
- Araujo, C., Astuti, W., & Yudana, G. (2023). Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 5(2), 155-169. <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/73074/41815>
- Asfari, H. (2022). Keadilan Lingkungan Pada Daerah Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Ditinjau berdasarkan Kualitas Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 111-122. <https://jurnaldrpm.budiluhur.ac.id/index.php/Kresna/article/view/29/73>
- Dwiputri, M., Hamdani, N., & Alam, B. (2020). ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN PADA LOKASI PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (Studi Kasus : Kampung Rawa Badung, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur). *Lakar Jurnal Arsitektur*, 3(2), 80-87.
- Irawan, R., Nugraha, A., & Firdaus, H. (2020). ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN PADA PERMUKIMAN MENGGUNAKAN MODEL GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (GWR)(STUDI KASUS : KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH). *Jurnal Geodesi Undip*, 9(2), 145-154.
- Mahardika, K. I. (2023). Analisis Immobilitas Penduduk Permukiman Kumuh Losari- Demangan Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Pabuang, R., Kalolo, L., & Suparjo, S. (2022). EVALUASI TINGKAT KEKUMUHAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI MOROWALI UTARA PENDAHULUAN. *Media Matrasain*, 19(2), 103-116.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Rambe, Y. S. (2021). Identifikasi Tingkat Kekumuhan Pada Kabupaten Langkat Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 19(2).

ROSYADI, A.D.F., Peran pusat Pelayanan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (P3ST) Bestari dalam pemberdayaan masyarakat Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Widyastuty, A., & Jihan, J. (2018). Tingkat Kekumuhan dan Analisis Spasial Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus: Surabaya Timur). *Jurnal Teknik Waktu*, 16(2), 47-55.

Wulandari, Y. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KOTAKU DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG SANGKRAH, KOTA SURAKARTA TAHUN 2020. *FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*.